

“Kalau penuntut korupsi tertinggi bisa jadi tersangka korupsi, siapa yang menjaga penjaganya?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Ketika Penjaga Hukum Melanggar Hukum"

Pekan ini publik menyaksikan sebuah paradoks yang mengganggu: seorang mantan pejabat tinggi di lembaga penuntutan — institusi yang tugasnya justru memberantas korupsi — kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Di lapisan lain, seorang kepala daerah tertangkap dalam operasi terkait dugaan pemerasan, dan sejumlah nama tersangkut aliran dana proyek besar. Pola yang berulang ini melahirkan satu pertanyaan klasik dalam teori

politik: *quis custodiet ipsos custodes* — siapa yang menjaga para penjaga? Ketika mekanisme pengawasan justru dijalankan oleh orang-orang yang bisa menjadi pelanggar, sistem menghadapi masalah struktural yang tidak selesai hanya dengan mengganti orang.

Lensa pertama datang dari ilmu ekonomi kelembagaan: teori principal-agent. Masyarakat (principal) mendelegasikan wewenang pada aparat (agent) karena tidak mungkin semua orang mengawasi semua hal. Masalahnya, agen punya informasi dan akses yang tidak dimiliki principal, menciptakan celah untuk penyalahgunaan. Implikasinya, setiap delegasi wewenang selalu mengandung risiko moral hazard. Celah lensa ini: ia memperlakukan korupsi murni sebagai persoalan insentif dan pengawasan, seolah manusia adalah kalkulator untung-rugi. Pertanyaan yang muncul: jika seluruh soal hanya soal desain insentif, mengapa ada orang yang tetap jujur meski punya semua peluang untuk curang?

Lensa kedua datang dari sosiologi organisasi. Korupsi jarang merupakan aksi individu terisolasi; ia sering menjadi budaya yang terlembaga, di mana "semua orang melakukannya" menjadi pembenaran kolektif. Seseorang yang masuk ke lingkungan semacam ini menghadapi tekanan konformitas yang luar biasa. Implikasinya, mengganti satu pejabat tidak mengubah apa pun jika ekosistemnya tetap. Celah lensa ini: ia berisiko menghapus tanggung jawab personal — jika semua ini soal struktur, maka tidak ada yang benar-benar bersalah. Pertanyaan yang muncul: pada titik mana individu berhenti menjadi korban sistem dan mulai menjadi pelaku yang bertanggung jawab?

Lensa ketiga datang dari teologi Islam tentang *amanah*. Dalam kerangka ini, jabatan bukan sekadar posisi fungsional, melainkan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. QS. Hud: 85 mengingatkan prinsip *mizan* — menegakkan timbangan dengan adil dan tidak mengurangi hak manusia — sebagai poros keadilan sosial. Yang

menarik, kerangka ini menempatkan pengawasan tertinggi bukan pada institusi manusia yang bisa dikorupsi, melainkan pada kesadaran akan pengawasan ilahi (*muraqabah*). Celah lensa ini: ia bisa dituduh terlalu bergantung pada kesadaran internal yang tidak bisa diverifikasi secara publik. Pertanyaan yang muncul: bisakah kesadaran spiritual menjadi fondasi tata kelola publik, atau ia tetap membutuhkan mekanisme institusional yang keras?

Lensa keempat datang dari psikologi moral. Riset tentang *ethical fading* menunjukkan bahwa pelanggaran besar jarang dimulai dari keputusan besar; ia bertumbuh dari serangkaian kompromi kecil yang secara bertahap menggeser batas normal seseorang. Menariknya, kerangka teologis tentang amanah yang "terkikis dari hati manusia" secara mengejutkan sejajar dengan temuan ini: erosi integritas adalah proses, bukan peristiwa. Celah lensa ini: ia menjelaskan mekanisme tapi tidak menjawab soal keadilan bagi korban — memahami bagaimana seseorang jatuh tidak menghapus dampak kejatuhannya pada yang dirugikan. Pertanyaan yang muncul: bagaimana masyarakat menyeimbangkan belas kasih pada mekanisme kejatuhan manusia dengan tuntutan keadilan bagi yang terzalimi?

Lalu apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa hari ini, jauh sebelum ia memegang jabatan besar? Ternyata banyak. Di ruang organisasi kampus, transparansi kas himpunan dan laporan dana kegiatan adalah latihan awal menjaga amanah publik — audit kecil-kecilan yang menumbuhkan otot integritas. Di ruang akademik, menolak plagiarisme dan joki tugas adalah bentuk paling dasar dari "menegakkan mizan": tidak mengambil hak intelektual orang lain. Di ruang magang, seorang mahasiswa bisa mengamati bagaimana kompromi kecil terjadi dan melatih diri untuk mengenali garis merahnya sendiri sebelum tekanan datang. Dan di ruang digital, menahan diri dari ikut menghakimi tanpa bukti adalah bentuk keadilan yang jarang dibicarakan. Integritas tidak dibangun saat seseorang duduk di kursi kekuasaan; ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil jauh sebelum kursi itu datang.

Pada akhirnya, paradoks penjaga yang melanggar tidak punya solusi tunggal. Setiap lensa menerangi satu sisi dan menggelapkan sisi lain: insentif tanpa moral melahirkan sinisme, moral tanpa institusi melahirkan naivitas, dan institusi tanpa kesadaran melahirkan formalitas kosong. Yang penting bukan menemukan kerangka yang menang, melainkan menyadari bahwa keadilan adalah kerja yang harus dijaga dari banyak arah sekaligus — dari desain sistem, dari budaya organisasi, dari kesadaran spiritual, dan dari integritas personal yang dilatih sejak dini.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukankah ini murni masalah sistem yang buruk, bukan soal moral personal? Menyalahkan individu itu naif.

A

Sebagian benar — sistem memang membentuk perilaku, dan mengabaikan itu akan berujung pada solusi individualistik yang mandul. Tapi mereduksi segalanya ke sistem juga punya bahaya: ia menghapus agensi dan tanggung jawab. Yang lebih utuh adalah melihat keduanya bekerja bersama — sistem menyediakan celah atau menutupnya, sementara individu tetap memilih untuk masuk atau menolak. Keduanya harus dibenahi, bukan salah satu.

Q · 02

Kenapa harus membawa agama? Bukankah tata kelola yang baik bisa sekuler sepenuhnya dan justru lebih universal?

A

Tata kelola sekuler memang bisa efektif, dan tidak ada yang menyangkal itu. Tapi pertanyaannya bukan agama versus sekuler, melainkan apa yang mengisi ruang ketika pengawasan eksternal tidak hadir. Semua sistem punya titik buta di mana tidak ada yang mengawasi. Kesadaran akan pengawasan yang lebih tinggi — apa pun namanya — mengisi ruang itu. Ini bukan klaim eksklusif; ini pengamatan tentang batas mekanisme eksternal.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan nasihat moral generik "jadilah orang jujur" yang membosankan itu?

A

Perbedaannya ada pada klaim mekanismenya. Nasihat generik berkata "jujurlah" tanpa menjelaskan mengapa orang gagal. Argumen di sini justru bertumpu pada temuan bahwa integritas terkikis bertahap lewat kompromi kecil — yang berarti solusinya bukan tekad besar sesekali, melainkan penjagaan garis merah dalam keputusan-keputusan kecil. Itu klaim yang bisa diuji, bukan slogan.

Q · 04

Kalau erosi integritas itu proses psikologis yang manusiawi, bukankah kita seharusnya lebih memaklumi pelaku daripada menghakimi?

A

Memahami mekanisme kejatuhan dan menuntut pertanggungjawaban bukan dua hal yang saling meniadakan. Kita bisa berkata "ini bisa terjadi pada siapa saja" sekaligus "tetap ada konsekuensi karena ada korban nyata". Belas kasih pada proses tidak boleh menjadi alasan menghapus keadilan bagi yang dirugikan. Keduanya justru menuntut kita membangun sistem yang mencegah kejatuhan sejak dini, bukan hanya menghukum setelahnya.

Saya sendiri tidak religius. Apakah prinsip amanah dan mizan ini masih relevan buat saya?

A

Relevan, karena prinsip-prinsip ini beroperasi di level etika yang bisa diakses tanpa harus menerima seluruh kerangka teologisnya. Gagasan bahwa hak orang lain tidak boleh dikurangi, dan bahwa integritas dibangun dari konsistensi keputusan kecil, adalah klaim etis yang bisa diuji dengan nalar. Kamu tidak harus setuju pada sumbernya untuk menemukan gagasannya berguna sebagai lensa membaca realitas.